

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 -2018)**

***THE INFLUENCE OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE, BALANCE FUND, AND GOVERNMENT SIZE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
(Case Study in the District/City of West Java Province in 2015 - 2018)***

Brigita Oktaviani¹, Sri Rahayu²

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹sayyidahumami@students.telkomuniversity.ac.id, ²sriahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, rasio *debt service coverage*, dan rasio pertumbuhan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *sampling* jenuh sehingga sampel pada penelitian adalah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan periode penelitian selama empat tahun dari 2015 – 2018 sehingga diperoleh 108 unit sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel ukuran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.

Kata Kunci: otonomi daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah

Abstrack

The success of regional autonomy is inseparable from the performance of regional governments in managing their finances in an orderly, obedient to the legislation, economically,

effectively, transparently, and responsibly. The performance evaluation of regional financial management is carried out on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The ability of the government to manage its finances can be measured by analyzing the regional financial performance. Several ratios are used to measure the performance of government finances, namely the ratio of regional financial independence, the degree of decentralization ratio, the ratio of regional financial dependency, the ratio of effectiveness and efficiency of local revenue, activity ratio, debt service coverage ratio, and growth ratio.

This research was conducted to find out how the simultaneous and partial influence between local original income, balance funds, and government measures on the financial performance of local governments in districts / cities in West Java Province in 2015 - 2018. This study uses quantitative methods with descriptive research type and hypothesis testing. The hypothesis tested using sampling analysis in this study is saturated sampling so that the sample in the study is 27 districts / cities in West Java Province with a four-year study period from 2015 - 2018 so that 108 sample units are obtained.

The results of this study indicate that original local government revenue variables, balancing funds, and government size simultaneously influence the financial performance of local governments in the districts / cities in West Java Province in 2015 - 2018. Partially local original income variables have a significant positive effect on government financial performance area. The variable balance fund has a significant negative effect on the financial performance of the regional government. While the government size variable does not significantly influence the financial performance of local governments in the districts / cities in West Java Province in 2015 - 2018.

Keywords : *regional autonomy, original local government revenue , balancing funds , government size , financial performance of local governments.*

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Undang-Undang No.32 tahun 2014 menjadi landasan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hakikatnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

.Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja daerahnya. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio-rasio keuangan. Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, rasio *debt service coverage*, dan rasio pertumbuhan ^[1].

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan^[2]. Kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah guna memperkecil

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berikut merupakan pengukuran variabel untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :^[3]

PAD : Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus^[4]. Berikut merupakan pengukuran variabel untuk mengukur dana perimbangan, yaitu^[3] :

Dana Perimbangan : DBH + DAU + DAK

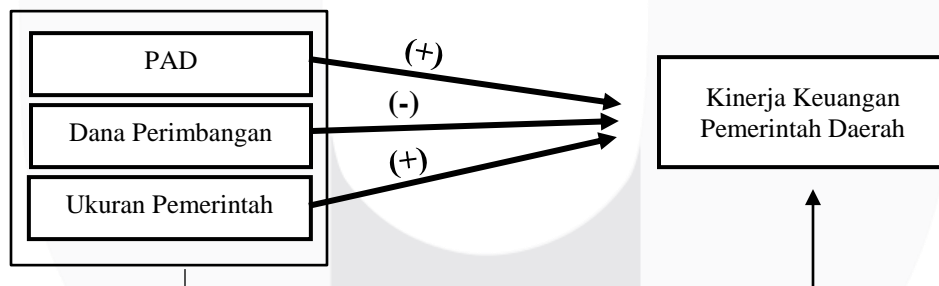
2.3 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah merupakan penentu besar atau kecilnya suatu pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan menggunakan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran pemerintah. Alasannya karena, nilai aset yang lebih stabil dibandingkan total pendapatan, jumlah pegawai, dan tingkat produktif suatu daerah. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan^[5] :

$$\text{Ukuran Pemerintah} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio derajat desentralisasi^[6] :



Gambar 2. 1

Model Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : secara simultan
- : secara parsial

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kerangka pemikiran dan merupakan uraian sementara dari permasalahan, maka hipotesis penelitian ini, yaitu:

- H₁ : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H₂ : Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H₃ : Dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H₄ : Ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.6 Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018 . Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dan diperoleh 108 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama empat tahun penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Rumus regresi data panel adalah sebagai berikut^[7] :

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- a : Konstanta
- β_1 : Koefisien regresi pendapatan asli daerah
- β_2 : Koefisien regresi dana perimbangan
- β_3 : Koefisien regresi ukuran pemerintah
- X_{1it} : Pendapatan asli daerah
- X_{2it} : Dana perimbangan
- X_{3it} : Ukuran pemerintah
- e : Error term

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif kinerja keuangan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran pemerintah pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Kinerja Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Ukuran Pemerintah
Rata-rata (Mean)	21.44%	742.802.411.774	1.582.229.982.102	5.984.887.332.245
Minimum	2.91%	64.506.109.613	428.013.539.172	1.351.756.386.482
Maksimum	48.01%	3.041.872.447.905	3.137.666.226.435	42.615.425.497.527
Standar Deviasi	11.32%	708.295.379.311	638.200.788	6.207.246.260.577

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 3.1 di atas di dapat 27 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dengan empat tahun periode penelitian yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar daripada nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan data penelitian yang bersifat berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan ukuran pemerintah memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Artinya bahwa data bersifat tidak berkelompok atau bervariasi.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan Tabel 3.2 di bawah, analisis regresi data panel secara sistematis diperoleh persamaan, sebagai berikut:

$$Y = 6.46 + 1.07 \text{ PAD} - 6.35 \text{ PD} + 6.39 \text{ UP} + e$$

Nilai konstanta sebesar **6.46** menyatakan bahwa jika persamaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah nol atau nilai tidak meningkat ataupun menurun (nilai tetap), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bernilai sebesar **6.46**. Nilai pendapatan asli daerah memiliki koefisien regresi sebesar **1.07** yang berarti pendapatan asli daerah meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar **1.07**. Dana perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar **-6.35** yang berarti dana perimbangan meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar **6.35**. Nilai ukuran pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar **6.39** yang berarti ukuran pemerintah meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar **6.39**.

3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji model *fixed effect* menggunakan *Eviews10*, selanjutnya dilakukan analisis koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis secara simultan (uji F), dan secara parsial (uji T) pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 3. 2

Hasil Model Random Effect

Total panel (balanced) observations: 108
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
REALISASI_PAD	1.07E+12	1.87E+11	5.718671	0.0000
DANA_PERIMBANGAN	-6.35E+12	1.28E+12	-4.943819	0.0000
UKURAN_PEMERINTAH	6.39E+12	3.49E+12	1.832447	0.0697
C	6.463030	0.750025	8.617090	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.805715	0.0615
Idiosyncratic random		3.146544	0.9385

Weighted Statistics			
R-squared	0.368976	Mean dependent var	5.625064
Adjusted R-squared	0.350773	S.D. dependent var	3.976016
S.E. of regression	3.203660	Sum squared resid	1067.398
F-statistic	20.27045	Durbin-Watson stat	1.415455

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: Eviews10 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 3.2, diperoleh nilai koefisien determinasi berdasarkan *Adjusted R-squared* sebesar 33,6%. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 33,6% dan 66,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang lain atau variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui Nilai probabilitas pendapatan asli daerah adalah 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 yang berarti pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai probabilitas dana perimbangan adalah 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 yang berarti dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai probabilitas ukuran pemerintah adalah 0.0814 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya ukuran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 – 2018. Semakin tingginya penerimaan pendapatan asli daerah maka, pemerintah daerah emakin memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintah daerah guna untuk meningkatkan pelayanan akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang semakin baik. Hasil penelitian sejalan dengan, penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Rioni (2019)^[8].

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kotab di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 – 2018. Semakin tinggi dana perimbangan diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggreni dan Artini (2019)^[9].

c. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat 2015 – 2018. Artinya bahwa total aset yang dimiliki pemerintah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016)^[10].

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel ukuran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2018.

4.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah rentang periode sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan lebih rinci.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti rasio tingkat ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian.

4.2 Aspek Praktisi

Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ukuran pemerintah melalui total aset pemerintah dengan melakukan manajemen aset yang digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan aset, bagaimana cara mendapatkan, menginventarisasi, lalu melakukan legal audit, mengoperasikan aset, memelihara aset, memelihara atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Hal tersebut akan membuat ukuran pemerintah semakin besar dan semakin besar juga kemudahan dalam melakukan operasional dan roda pemerintahan daerah dalam melakukan otonomi daerah sehingga akan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [2] *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- [3] Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- [4] Badan Pemeriksa Keuangan
- [5] Tama, I., & Adi, P. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepada Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ejournal UKSW*, 9 - 113.
- [6] Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Saraswati, D., & Rioni, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 110 - 120.
- [9] Anggreni, N., & Artini, L. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- [10] Noviyanti, & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.